

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dilahirkan dalam keadaan yang berbeda-beda. Mereka berasal dari keluarga yang berbeda. Begitu pula jenis kelamin, keturunan, dan keanggotaan seseorang di suatu masyarakat. Kondisi tersebut semakin berbeda apabila dikaitkan dengan usia, kepandaian, dan kondisi sosial tempat seseorang berada. Oleh karena itu, secara otomatis, perbedaan sosial seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dibawa sejak lahir. Hal seperti itu menimbulkan adanya struktur sosial di masyarakat.

Dimensi struktur masyarakat dapat dilihat secara horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal membentuk ketidaksamaan sosial, sedangkan dimensi vertikal membentuk stratifikasi sosial. Dimensi horizontal biasanya disebut sebagai diferensiasi atau ketidaksamaan sosial, yakni suatu perbedaan sosial secara horizontal. Dalam arti perbedaan yang terjadi tidak mengandung perbedaan secara bertingkat. Hal itu hanya berbeda saja dengan yang lain. Sebaliknya, dimensi vertikal melihat masyarakat secara bertingkat. Dalam kenyataan sosial, dimensi vertikal akan tampak pada stratifikasi sosial, kelas sosial, dan status sosial di masyarakat (Soeroso, 2008: 3). Oleh karena itu, apakah posisi seseorang berada pada lapisan atas, menengah, atau bawah adalah wujud dari dimensi struktur sosial secara vertikal.

Namun, di masyarakat sering muncul penilaian bahwa perbedaan dalam dimensi horizontal juga masuk dalam ranah dimensi vertikal. Sebagai contoh pekerjaan. Pada hakikatnya suatu pekerjaan didasarkan pada nilai kemanusiaan yang sama. Seseorang bekerja untuk memenuhi nafkah bagi diri sendiri dan keluarga. Jenis pekerjaan dapat berbeda-beda. Semua itu pada hakikatnya untuk memenuhi nilai kemanusiaan tersebut. Namun, perbedaan pekerjaan itu menimbulkan dimensi vertikal ketika orang membandingkan pekerjaan tersebut dari beberapa aspek. Misalnya, penghasilan yang diperoleh besar atau kecil, sifat pekerjaan kasar atau halus, jenis pekerjaan tersebut membutuhkan banyak pikiran

atau tenaga. Pandangan-pandangan seperti ini menjadikan pekerjaan yang mestinya sebagai unsur diferensial memiliki dimensi vertikal. Misalnya, pekerjaan sebagai dokter akan lebih dihargai daripada pekerjaan sebagai tukang sapu (Soeroso: 2008: 4). Begitu pula pekerjaan sebagai direktur atau lebih dipandang daripada pekerjaan sebagai staf. Setiap masyarakat memiliki penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu dalam masyarakatnya. Penghargaan yang lebih tinggi terhadap hal-hal tertentu akan menempatkan hal tersebut pada kedudukan yang lebih tinggi lainnya. Kalau suatu masyarakat lebih menghargai kekayaan materi daripada kehormatan, misalnya mereka yang lebih banyak mempunyai kekayaan materi akan menempati kedudukan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pihak-pihak lain. Gejala tersebut menimbulkan lapisan masyarakat yang merupakan pembedaan posisi seseorang atau suatu kelompok dalam kedudukan yang berbeda-beda secara vertikal (Lubis, 2002:1.). Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dimensi vertikal menimbulkan stratifikasi sosial di masyarakat. Hal itu disebabkan terbatasnya suatu penghargaan di masyarakat. Akibatnya, distribusi penghargaan di masyarakat tidak merata. Mereka yang banyak memperoleh penghargaan dapat menduduki kelas atas. Sebaliknya, mereka yang tidak memperolehnya berada di kelas bawah.

Diferensiasi sosial terjadi karena seorang individu atau kelompok secara biologis dan fisik berbeda. Keberadaannya sudah diberadakan melalui keturunan. Jadi, pada dasarnya tidak ada manusia yang sama persis, baik fisik maupun kepribadian. Begitu pula pengalaman, hobi, status sosial, latar belakang budaya, dan kepribadiannya. Begitu pula masalah usia, jenis kelamin, ras, pertalian darah, dan kebudayaan mereka.

Stratifikasi sosial adalah dimensi vertikal dalam struktur sosial masyarakat. Dalam arti terjadinya perbedaan masyarakat dapat dilihat berdasarkan pelapisan yang ada. Yakni, apakah perbedaan itu berlapis-lapis secara vertikal dan apakah pelapisan tersebut terbuka atau tertutup. Dengan demikian, struktur masyarakat dibedakan ke dalam kelas secara bertingkat, menjadi kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah berdasarkan suatu kriteria tertentu. Bahkan Horton (dalam Soeroso, 2008: 11) mengemukakan pendapat Aristoteles tentang adanya

pembagian golongan penduduk. Mereka dibagi menjadi golongan sangat kaya, sangat miskin, dan golongan di antara mereka. Dari pandangan itu dapat juga dijelaskan bahwa stratifikasi sosial adalah gejala universal. Maksudnya, di dalam setiap masyarakat pasti didapati adanya pelapisan sosial tersebut. Kriteria yang dikemukakan Aristoteles tersebut juga menyatakan bahwa di dalam suatu masyarakat tidak akan ditemukan masyarakat yang tanpa kelas.

Kehidupan masyarakat saat itu juga kian berkembang. Kehidupan mereka kian modern dan kompleks. Hal ini juga berpengaruh terhadap beragamnya stratifikasi sosial di masyarakat. Mengapa bisa begitu? Ada beberapa hal yang turut berpengaruh terhadap terjadinya stratifikasi sosial tersebut. Yang pertama adalah adanya penghargaan yang terbatas. Sesuatu yang dihargai tersebut, antara lain, menyangkut kekayaan dan penghasilan, pekerjaan, dan pendidikan (Horton dalam Soeroso, 2008: 12). Adapun Soekanto (2012: 133) menjelaskan empat kriteria yang menjadikan masyarakat berlapis-lapis. Keempat faktor tersebut adalah ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, dan ukuran pengetahuan. Semua kriteria itu otomatis juga turut memengaruhi pandangan masyarakat. Mereka turut punya andil dalam terbentuknya stratifikasi sosial tersebut. Di dunia pendidikan, stratifikasi sosial juga tampak. Pengetahuan seseorang akan terlihat di lingkungan pendidikan. Orang yang memiliki gelar profesor tentu akan dipandang sebagai orang yang memiliki kelas atas di bidang pendidikan. Orang yang tidak berpendidikan tinggi tentu merasa dirinya berada di strata bawah.

Kian beragamnya stratifikasi sosial di masyarakat juga memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, antara lain, menjadikan masyarakat berusaha maju dan berprestasi. Tujuannya jelas, agar stratanya berpindah ke posisi yang lebih baik. Hal ini juga mendorong kompetisi di masyarakat agar dapat naik ke strata atas. Anak keluarga miskin, misalnya, berusaha belajar giat agar meraih kesuksesan sehingga stratanya juga meningkat. Selain itu, mobilitas sosial akan mempercepat perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Selain dampak positif, stratifikasi sosial juga membawa dampak negatif. Misalnya, timbul konflik antarkelas sosial, antarkelompok, dan antargenerasi.

Seperti disebutkan di atas, terdapat lapisan sosial berdasarkan kekayaan, kekuasaan, dan pendidikan. Apabila terjadi perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas sosial di masyarakat sangat mungkin terjadi konflik antarkelas. Misalnya, demo buruh dengan pengusaha. Selain itu, masyarakat dikelompokkan ideologi, profesi, agama, suku, dan sebagainya. Bila salah satu kelompok berusaha menguasai kelompok lain, tentu timbul konflik. Contoh yang sering terjadi adalah adanya tawuran antar pelajar atau supporter sepak bola. Sementara itu, generasi tua yang mempertahankan nilai-nilai lama dapat berkonflik dengan generasi muda yang ingin mengadakan perubahan. Contoh riil adalah pergaulan bebas. Terdapat pandangan yang bertolak belakang terhadap model pergaulan anak sekarang. Saat ini dampak-dampak negatif seperti diuraikan di atas hampir terjadi setiap saat. Demo buruh dengan pengusaha hampir setiap tahun terjadi. Para buruh menganggap gaji mereka kurang. Mereka pun protes dengan menggelar demo di jalanan. Sebaliknya, pengusaha merasa gaji para buruh sudah tinggi sehingga tidak perlu dinaikkan lagi. Begitu pula konflik antarkelompok. Contoh terbaru adalah saat akan berlangsungnya pemilihan gubernur DKI Jakarta. Kampanye para kandidat diisukan diwarnai dengan berbagai intrik yang menyinggung masalah agama dan sara. Bila tidak diantisipasi dengan baik, kondisi seperti itu dapat memecah belah bangsa Indonesia. Tidak terkecuali kejadian-kejadian konflik politik di tanah air.

Setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargai. Sesuatu itu akan menjadi bibit yang akan dapat menumbuhkan adanya sistem yang berlapis-lapis atau stratifikasi sosial dalam masyarakat tersebut. Stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara hierarkis (Soerjono & Mustafa, 1982: 197). Misalnya, masyarakat Bali yang terbagi atas kasta-kasta atau Jakarta (atau tempat-tempat lainnya) ada orang-orang kaya, setengah kaya, dan miskin. Dalam realitas sehari-hari terlihat bahwa masyarakat itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang pengelompokan berdasarkan ekonomi, pendidikan, sosial, jabatan, dan sebagainya. Pengelompokan secara ekonomi melahirkan golongan kaya-miskin. Tinggi rendahnya pendidikan menciptakan perbedaan perlakuan. Secara sederhana, perbedaan kelas

sosial bisa terjadi dan dilihat dari perbedaan besar penghasilan rata-rata seseorang setiap hari atau setiap bulannya. Dari klasifikasi usia, di berbagai suku biasanya terdapat sesepuh yang dihormati. Mereka biasanya punya andil besar di wilayahnya. Otomatis, mereka menempati lapisan masyarakat atas. Pendapatnya pun selalu menjadi rujukan bagi masyarakat.

Jenjang pendidikan seseorang biasanya memengaruhi status sosial seseorang di dalam struktur sosialnya. Maka tinggi rendahnya tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh kepada pola-pola kehidupan orang tersebut. Oleh karena itu, seseorang yang berpendidikan tinggi hingga bergelar Doktor tentunya akan berstatus lebih tinggi dibanding seseorang yang lulusan SD. Jenjang pendidikan ini biasanya berpengaruh pada mobilitas sosial bersifat vertikal baik vertikal naik maupun vertikal turun. (Kolip, 2011: 432).

Karakteristik masyarakat pesisir terbentuk secara alamiah dipengaruhi oleh keadaan alam. Misalnya, mereka sangat terbuka dan terbiasa berbicara dengan nada keras. Hal itu disebabkan mereka dekat pantai yang tidak asing dengan deru ombak. Selain itu, secara historis lintas kultural terjadi di daerah pesisiran yang dikenal dengan "nusa jawa silang budaya". Dalam hal ini masyarakat pesisir mengalami proses sentuhan globalisasi, Cinaisasi, Arabisasi, Westernisasi. Dengan demikian, masyarakat pesisir mempunyai karakter yang unik. Tidak heran apabila kota-kota besar tumbuh di daerah pantura seperti Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Pernyataan tersebut diungkapkan *Mukhsin Jamil, Kapuslit IAIN Walisongo Semarang dalam diskusi di Lembaga Studi Sosial dan Agama* pada 23 September 2011. <http://elsaonline.com/potensi-konflik-di-jawa-tengah-mulai-dari-resources-hingga-kuatnya-aliran-kepercayaan/> diunduh tanggal 20 Juni 2017

Karena adanya sentuhan berbagai budaya, sangat mungkin terjadi konflik majemuk di daerah tersebut. Di Semarang misalnya. Meskipun berbagai tradisi telah melebur, ada situasi multikultural bahwa semua kelompok tetap eksis dan berkembang, seperti Arab, Cina dll. Mereka saling memotong dalam sebuah tradisi toleransi. Sebagai contoh terdapat kesaamaan agama, tetapi berbeda etnis atau berbeda ekonomi. Karena itu, di daerah pantura sebuah konflik biasa muncul dari fenomena seperti itu. Meskipun begitu, kemunculan konflik di masing masing

wilayah bergantung pada komposisi demografi, urbanisasi, dan proses pembangunan yang belum selesai. Sebagai contoh di daerah *borderline* antara Demak dan Semarang. Lahirnya konflik bukan disebabkan isu agama, tetapi disebabkan adanya kepentingan ekonomi. Terdapat disfungsi lahan karena perkembangan industri yang masif di Semarang yang menyebabkan kerusakan pesawahan dan *fish ground* (tambak) di daerah perbatasan. Dalam fenomena tersebut telah terjadi ketimpangan antara kepentingan masyarakat dan pemerintah atau pengusaha.

Mukhsin menjelaskan adanya potensi konflik di Pekalongan. Di sana terdapat kelompok Cina dan Arab (etnis), Sunni dan Syiah (aliran keagamaan). Di antara keempat kelompok tersebut, sentimen terhadap Cina cukup besar, meskipun sekarang kelompok tersebut sudah menjadi kecil (minoritas). Adapun masalah Syi'ah-Sunni, di Pekalongan terdapat forum secara sistematis melawan Syiah. Faktor konflik lainnya disebabkan faktor politik. Daerah tersebut merupakan korban kegagalan upaya Golkarisasi secara masif pada Orde Baru. Seperti Kasus Dongos, yaitu upaya *status quo* untuk mengadu domba antara PPP dan PKB. Kasus lainnya penyebaran isu bahwa pemuda PPP dikeroyok PKB dan sebaliknya.

Dalam hal kekayaan alam, pemerintah dinilai cenderung berpihak kepada pengusaha. Pemodal atau perusahaan masih memiliki 'kartu VIP' dalam menguasai kekayaan alam. Ketika terjadi konflik, warga berada di pihak terlemah. Tidak jarang, perusahaan bersama pemerintah menghadapi warga. Hal itu diungkapkan Nur Kholis, Komisioner Komnas HAM, dalam diskusi Walhi di Jakarta pada 31 Oktober 2016. Dia menilai, relasi antara pemerintah dan korporasi berlawanan dengan masyarakat. Konflik dengan masyarakat makin meningkat. Kala kedua hubungan sejalan (pengusaha dan pemerintah), masyarakat jadi terabaikan.

Konflik lain juga terjadi antarnelayan. Misalnya dalam hal penggunaan alat penangkap ikan berupa pukat harimau alias arad. Sebagian besar nelayan sangat menolak penggunaan jaring pukat harimau. Selain merusak ekosistem laut, jaring tersebut merusak alat tangkap milik nelayan. Juga tidak ada tindakan tegas dari

aparatus dan instansi terkait. Akhirnya terjadi keributan antarnelayan. Hal ini tentu dapat menimbulkan problem sosial. Apabila permasalahan tersebut tidak ditangani secara komprehensif, perselisihan bisa kian meluas. Akibat secara tidak langsung, faktor stratifikasi sosial yang mestinya tidak ada kaitannya dengan permasalahan itu dapat terkena imbasnya. Para petani nelayan itu bisa berdemo pemerintah dan pengusaha yang secara ekonomi lebih kaya. Hal ini menunjukkan bahwa stratifikasi kekayaan dapat memantik konflik bila tidak disikapi secara bijaksana. http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/04/23/n8_tsw-arad-kerap-timbulkan-konflik-antarnelayan

Bukti terbaru adalah keributan nelayan pada 22 April 2017. Konflik terjadi karena masih ada nelayan yang menggunakan jaring pukat harimau dan merusak jaring nelayan tradisional. Aparatus kepolisian sudah turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut. Meski demikian, keributan tidak dapat dihindarkan. <http://www.radarcirebon.com/terlibat-konflik-nelayan-mundu-tak-melaut.html>

Sementara itu, dari sisi skala usaha perikanan, kelompok masyarakat pesisir cenderung digolongkan pada kelompok miskin yang terdiri atas rumah tangga perikanan menangkap ikan tanpa menggunakan perahu, menggunakan perahu tanpa motor dan perahu bermotor tempel. Kemiskinan yang merupakan indikator ketertinggalan masyarakat pesisir ini disebabkan paling tidak oleh tiga hal utama: kemiskinan struktural, kemiskinan super-struktural, dan kemiskinan kultural. Secara faktual, ada dua faktor yang menyebabkan kemiskinan pada masyarakat nelayan, yaitu faktor alamiah dan non alamiah. Faktor alamiah disebabkan fluktuasi musim tangkap ikan dan struktur alamiah sumber daya ekonomi desa. Sementara faktor non alamiah berhubungan dengan keterbatasan daya jangkau teknologi penangkapan ikan, ketimpangan dalam sistem bagi hasil dan tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja, lemahnya penguasaan jaringan pemasaran hasil tangkapan dan belum berfungsinya koperasi nelayan yang ada. Selain itu, masalah teknologi konservasi atau pengolahan yang sangat tradisional, serta dampak negatif orientasi produktivitas yang dipacu oleh kebijakan motorisasi perahu dan modernisasi peralatan tangkap (revolusi biru) yang telah berlangsung sejak tiga dasawarsa terakhir (Kusnadi, 1998).

Kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir sering timbul konflik-konflik yang digolongkan menjadi empat jenis konflik. Pertama, konflik kelas, yaitu antarkelas sosial nelayan dalam memperebutkan wilayah penangkapan, seperti konflik nelayan skala besar di sekitar perairan pesisir yang sebenarnya diperuntukan bagi nelayan tradisional. Kedua, konflik orientasi yang terjadi antar nelayan yang memiliki perbedaan orientasi (jangka pendek dan panjang) dalam pemanfaatan sumber daya, seperti konflik horizontal antara nelayan yang menggunakan bom dengan nelayan lain yang alat tangkapnya ramah lingkungan. Ketiga, konflik agraria akibat perebutan *fishing ground*. Konflik ini dapat terjadi pada nelayan antarkelas maupun nelayan dalam kelas sosial yang sama. Bahkan, dapat juga terjadi antara nelayan dengan pihak bukan nelayan, seperti konflik dengan para penambang pasir dan industri pariwisata. Keempat, konflik primordial, yang menyudutkan sistem pemerintahan otonomi dan desentralisasi kelautan. Konflik identitas tersebut tidak bersifat murni, melainkan tercampur dengan konflik kelas maupun konflik orientasi yang sebenarnya kerap terjadi sebelum diterapkannya otonomi daerah. (Kusnadi, 1998) <http://ast1324.blogspot.co.id/2014/11/sosiologi-masyarakat-pesisir-analisa.html>

Salah satu faktor timbulnya berbagai konflik seperti diuraikan di atas adalah adanya kesamaan keinginan masyarakat dalam melakukan kegiatannya. Penguasa, misalnya, belum mampu bertindak dan berlaku secara adil dan bijaksana. Ada kesan, masyarakat yang memiliki stratifikasi kekayaan lebih tinggi justru mendapat perlindungan lebih baik daripada masyarakat nelayan yang secara ekonomi kurang beruntung. Begitu pula dengan tindakan anarkistis yang dilakukan sekelompok masyarakat. Emosi masyarakat bawah bisa begitu mudah tersulut. Mereka kadang melakukan kekerasan dengan cara main hakim sendiri. Kedua ilustrasi tersebut menjelaskan bahwa stratifikasi sosial tidak hanya berbicara tentang kelas-kelas sosial begitu saja. Apabila tidak disikapi dengan baik, perbedaan stratifikasi sosial dapat menimbulkan berbagai masalah. Penguasa yang arogan dapat menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang. Konglomerat dapat memaksakan kehendaknya kepada rakyat jelata. Jadi, dapat

disimpulkan bahwa stratifikasi sosial juga membawa dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat.

Beberapa permasalahan seperti yang terungkap di atas juga tercermin pada novel *Wasripin dan Satinah* karya Kuntowijoyo. Berdasarkan observasi awal didapati beragam stratifikasi sosial sekaligus konflik sosial di dalam novel tersebut. Kondisi tersebut memang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, membicarakan stratifikasi sosial tidak dapat dilepaskan dari konflik yang menyertainya. Selain itu, bagi pengarang, Kuntowijoyo mampu menyuguhkan realitas yang terjadi di masyarakat. Melalui novel *Wasripin & Satinah*, Kuntowijoyo menjelaskan perilaku sebagian besar bangsa Indonesia yang irasional, mulai kalangan bawah hingga kalangan atas. Kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia tak pernah lepas dari urusan klenik yang tak dapat diukur dengan logika. Sepak terjang tokoh Wasripin menggegerkan kampung nelayan. Hal itu menyeretnya dalam pusaran politik dalam negeri. Lurah, camat, bupati, tentara, polisi, hingga pimpinan partai ikut terlibat. Mereka ternyata tak jauh berbeda dengan rakyat kebanyakan. Intrik politik tak pernah jauh dari urusan kekuasaan. Bagaimana suka duka berhadapan dengan orang-orang yang berada di strata di atasnya. Tindakan penghinaan pun menjadi makanan sehari-hari masyarakat strata bawah. Oleh karena itu, rasanya novel *Wasripin dan Satinah* dapat menjadi cermin bagi setiap orang untuk berkaca. Setidaknya novel ini memberikan peringatan kepada pembacanya untuk bisa berlaku bijaksana. Jadi, penelitian yang mendalam terhadap novel *Wasripin dan Satinah* ini bisa memberikan analisis tentang berbagai fenomena stratifikasi sosial di masyarakat, khususnya Indonesia.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan pada:

1. Stratifikasi sosial berdasarkan kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan pada novel *Wasripin dan Satinah* karya Kuntowijoyo

2. Dampak stratifikasi sosial pada *Wasripin dan Satinah* karya Kuntowijoyo terhadap nasib tokoh Wasripin.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada:

1. Mendeskripsikan stratifikasi sosial berdasarkan kekayaan, kehormatan/kekuasaan, ilmu pengetahuan pada novel *Wasripin dan Satinah* karya Kuntowijoyo
2. Mendeskripsikan dampak stratifikasi sosial pada *Wasripin dan Satinah* karya Kuntowijoyo terhadap nasib tokoh Wasripin.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan keilmuan dan praktis. Manfaat pertama adalah manfaat yang bersifat teroretis dan manfaat kedua bersifat praktis yang dijabarkan sebagai berikut.

a. Manfaat teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai studi bahasa Indonesia, khususnya dengan teori sosiologi sastra. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian sejenis pada masa mendatang. Artinya, penelitian itu bisa memberikan gambaran tentang cermin kehidupan sosial masyarakat pesisir pantai, Jawa Tengah. Permasalahan yang ada dalam masyarakat pesisir pantai, Jawa Tengah yang menghiasi novel ini menunjukkan betapa perkembangan zaman menjadikan perilaku dan pola pikir masyarakat semakin jauh dari strata sosial yang seharusnya. Permasalahan tersebut terefleksikan dengan baik dalam karya sastra.

b. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat yang berkecimpung di bidang pendidikan dan pembelajaran. Secara terinci manfaat praktis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan dan menyosialisasikan teori yang diperoleh selama perkuliahan.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam kajian terhadap suatu karya sastra dari sudut sosiologi sastra.

3. Bagi Mahasiswa

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi salah satu bagian yang berguna bagi rujukan mahasiswa dalam menelaah suatu karya sastra dari sudut pandang ekstrinsik.

E. Definisi Istilah

1. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan anggota masyarakat kedalam lapisan-lapisan sosial secara bertingkat. Atau definisi stratifikasi sosial yaitu merupakan suatu pengelompokan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya.
2. Kekayaan merupakan dasar yang paling banyak digunakan dalam pelapisan sosial masyarakat. Seseorang yang mempunyai kekayaan banyak akan dimasukkan ke lapisan atas dan yang mempunyai kekayaan sedikit akan dimasukkan ke lapisan bawah
3. Ukuran kehormatan dapat terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan atau kekuasaan. Orang-orang yang disegani atau dihormati akan menempati lapisan atas dari sistem pelapisan sosial masyarakatnya. Ukuran kehormatan ini sangat terasa pada masyarakat tradisional. Biasanya mereka sangat menghormati orang-orang yang banyak jasanya kepada masyarakat, para orang tua ataupun orang-orang yang berperilaku dan berbudi luhur.
4. Ukuran kekuasaan seseorang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang paling besar akan menempati lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial dalam masyarakat. Ukuran kekuasaan sering tidak lepas dari ukuran kekayaan, sebab orang yang kaya biasanya dapat menguasai orang yang tidak kaya. Selain itu, kekuasaan dan wewenang juga dapat mendatangkan kekayaan

5. Ukuran ilmu pengetahuan sering dipakai oleh anggota-anggota masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan tinggi dalam sistem pelapisan sosial masyarakat yang bersangkutan. Penguasaan ilmu pengetahuan ini biasanya terdapat dalam gelar-gelar akademik (kesarjanaan), atau profesi yang disandang oleh seseorang, misalnya dokter, insinyur, doktorandus, doktor ataupun gelar profesional seperti profesor. Namun sering timbul akibat-akibat negatif dari kondisi ini jika gelar-gelar yang disandang tersebut lebih dinilai tinggi daripada ilmu yang dikuasainya, sehingga banyak orang yang berusaha dengan cara-cara yang tidak benar untuk memperoleh gelar kesarjanaan, misalnya dengan membeli skripsi, menyuap, ijazah palsu dan seterusnya.

F. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika penulisan, penulis akan menjelaskan secara ringkas bab demi bab secara berurutan. Urutan penulisan bab yang akan disajikan adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Merupakan garis besar, arah tujuan, dan alasan penelitian yang mendorong penulis melakukan penelitian dan meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan, manfaat penelitian (manfaat teoretis dan manfaat praktis), serta sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Memaparkan lebih jauh mengenai teori yang menjadi landasan penelitian, yang meliputi: tinjauan pustaka, kerangka pemikiran.

BAB III : Metodologi Penelitian

Di bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, data penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan interpretasi data

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini memaparkan hal yang berkaitan dengan deskripsi data dan pembahasan

BAB V : Penutup

Bab ini berisi simpulan dan saran.